

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH
DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Kasus pada DPPD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2013-2016)**

Handika Ahmarian¹⁾ , Patricia Dhiana Paramita²⁾ , Marsiska Ariesta P³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang

^{2) 3)} Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

This study aims to determine whether or not the influence of Regional Original Income, Regional Taxes and Regional Levies on Regional Expenditures with Regional Area as a moderating variable in the Central Java Provincial Government. This research was conducted in the Central Java Provincial Revenue and Management Service. The method in this study is to collect data obtained from documentation (files) from the Central Java Provincial Revenue and Management Service Office in the City of Semarang. The sample in this study is Regional Original Revenue, Regional Taxes and Regional Retribution on the Budget. with the Area as a moderating variable in the Central Java Provincial Government from 2013-2016 so that the number of samples in this study is 140 data. The data analysis technique used is multiple linear regression. The data analysis technique used to test this hypothesis is multiple linear regression analysis which includes F Test, T Test, and Determination Coefficient. All data is processed using the SPSS 20.0 Program which was first tested using the Classic Assumption Test which includes Normality Test, Heteroscedasticity Test, and Autocorrelation Test

The F Test results show that local revenue, regional taxes, and regional retribution on regional expenditure budgets with moderating variables affect the Original Revenue of the Central Java Province. This is because the level of significance at ANOVA is $0.000 < 0.05$. Whereas from the results of the calculation of the T Test, each of the independent variables shows that the regional tax does not have a significant effect on the regional expenditure budget which moderates the area of 2013-2016

Keywords: Original Daerah Opinion, Regional Taxes, Regional Retribution, Regional and Regional Expenditure Budgets.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, yaitu pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD). Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, pemerintah daerah mempunyai upaya yaitu salah satunya dengan adanya pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan

harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menambah asset tetap (Siska, 2014) Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Keuangan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Setyowati dan Yohana (2012) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk masing-masing daerah yang menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini

disebabkan karena PAD tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya (Dini, 2013).

Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto, 2010).

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dari sektor Dana Perimbangan, yang dimungkinkan akan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah adalah

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang dipahami sebagai hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Daerah

Paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*. Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2015).

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu :

1. Perumusan proposal anggaran,
2. Pengesahan proposal anggaran,
3. pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum dalam Darwanto (2010) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning, legislative approval, executive implementation, and ex post*
4. *accountability*. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran

Menurut Mardiasmo (2012), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran operasional
Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah.
2. Anggaran modal
Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka

panjang dan pembelanjaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya.

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”

Belanja Modal

Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Wertiant dan Dwirandra, 2013:573). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

Luas Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi.

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah, maksudnya semakin besar Luas Wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Diana dan Lilis, 2010:1).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (UU No. 28 Tahun 2009). Retribusi Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negative bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Pendapatan Asli Daerah (X1), Pajak Daerah (X2), dan Retribusi Daerah (X3)

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat memperediksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya yang terjadi

kemudian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah : adalah Anggaran Belanja Daerah (Y).

Variabel Moderating

Variabel yang fungsinya mempengaruhi hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh itu dapat memperkuat dan atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah : Luas Wilayah (M).

Definisi Operasioanal

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Anggaran Belanja Daerah
5. Luas Wilayah

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota dari tahun 2013-2016.

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data dengan jumlah 35 Kabupaten/Kota x 5 tahun = 140 (N), jadi populasi ini merupakan sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif. Menurut Kurniawan (2009) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa data pajak yang diambil dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (DPPD) Provinsi Jawa Tengah yang memberikan informasi berupa data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Jawa Tengah dari tahun 2013-2016 mengenai jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah data pajak

yang diambil dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (DPPD) Provinsi Jawa Tengah yang memberikan informasi berupa data dan Luas Wilayah yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011), dengan mengumpulkan data-data dari Laporan Realisasi APBD diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (DPPD) Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang sejak tahun 2013-2016 dan Luas Wilayah yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan statistik deskriptif dan Uji Asumsi Klasik, antara lain : Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinearitas,

Analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²) dan Uji Hipotesis.

Statistik Deskriptif

Menurut Yulius (2010) deskriptif berarti memberi gambaran. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data di analisis menggunakan regresi berganda, data telah lulus uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, uji Glejser, dan uji autokorelasi

Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov (Normalitas) bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Jika terdapat data yang terdistribusi secara tidak normal maka uji statistik t dan f tidak dapat diterapkan. Pengujian tentang normal atau tidaknya suatu data dilakukan dengan 2

cara yaitu : dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik normal *Probability-Plot*. Sedangkan dengan uji statistik dapat dilakukan dengan uji *non parametric Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Jika variabel bebas (independen) saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*), bila nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 berarti data bebas multikolinearitas.

Uji Glejser

Uji Glejser (Heteroskedastisitas) bertujuan untuk melihat apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai dari dw (*durbin-watson*), dl dan du .

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau

lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen di atas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Pajak Daerah (X_2), dan Retribusi Daerah (X_3), terhadap variabel dependen adalah Anggaran Belanja Daerah (Y).

Uji Nilai Selisih Mutlak (*absolute difference value*)

Uji hipotesis moderating dilakukan dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak dengan alasan model ini mampu mengatasi multikolinearitas yang umumnya terjadi sangat tinggi apabila menggunakan uji interaksi dan model ini memasukkan variabel efek utama dalam analisis regresi, sedangkan uji residual hanya memasukkan efek interaksi saja. Uji nilai selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan

antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 [X-Z] + e$$

Keterangan :

Y = Anggaran Belanja Modal

α = Konstanta

X = Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Rretribusi Daerah

Z = Luas Wilayah

[X-Z] = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara pendapatan daerah dan Luas Wilayah

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R² bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R² bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a) Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- b) Jika Kd menjauhi nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Uji Hipotesis

Menurut Priyatno (2010) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara parsial atau uji t dan pengujian secara simultan/ uji f.

Uji Regresi Secara Simultan (f)

Uji statistik "F" atau uji signifikansi simultan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat

atau dependen. Apabila nilai sig dari Fhitung lebih kecil dari tingkat kesalahan / *error (alpha)* 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang di estimasi layak , sedangkan apabila nilai *sig* dari F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak

Uji Regresi Secara Parsial (t)

Uji t (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variable dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan *p-value* pada kolom *Sig* masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

- a) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
- b) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Luas Wilayah akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.1.

Uji Instrumen

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENDAPATAN ASLI DAERAH	140	28068357.00	1232373211.00	197461226.3214	151930950.10349
PAJAK DAERAH	140	.00	858764751.00	68354248.6429	113938821.90845
RETRIBUSI DAERAH	140	4933419.00	115501936.00	25712089.9500	18930372.18654
ANGGARAN BELANJA DAERAH	140	622827848.00	4221348359.00	1696747758.3429	591028743.26812
Valid N (listwise)	140				

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa pada variabel pendapatan asli daerah minimum sebesar 280,068,357.00 dan maksimum sebesar 1,232,373,211.00 dengan rata-rata 197,461,226.3214 dan standar deviasi sebesar 151,930,950.10349 Pada variabel pajak daerah minimum sebesar .00 dan maksimum sebesar 858,764,751.00 dengan rata-rata 68,354,248.6429 dan standar deviasi sebesar 113,938,821.90845 Variabel retribusi daerah minimum

4,933,419.00 sebesar dan maksimum sebesar 115,501,936.00 dengan rata-rata 25,712,089.9500 dan standar deviasi sebesar 18,930,372.18654 Variable anggaran belanja daerah minimum sebesar 622,827,848.00 dan maksimum sebesar 42,213,483,359.00 dengan rata-rata 1,696,747,758.3429 dan standar deviasi sebesar 591,028,743.26812

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012:132). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov.

Tabel 4.2 Uji Normalitas (model 1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		139
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0062263
	Std. Deviation	1,45659270
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,045
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		,618
Asymp. Sig. (2-tailed)		,840

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

Dari hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) yaitu 0,840 dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi secara normal.

Tabel 4.3 Uji Normalitas (model 2)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,1123494
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,049
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,567
Asymp. Sig. (2-tailed)		,905

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

Dari hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) yaitu 0,905 dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif data penelitian :

Uji Multikolinieritas (model 1)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua nilai VIF variabel bebas dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0.10 dapat dinyatakan bahwa dalam regresi tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 4.4

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pendapatan asli daerah	,930	1,256
	pajak daerah	,904	2,928
	retribusi daerah	,909	1,315
	mod1	,901	1,367
	mod2	,900	4,343
	mod3	,900	2,092

a. Dependent Variable: anggaran belanja

Uji Multikolinieritas (model 2)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua nilai VIF variabel bebas dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0.10 dapat dinyatakan bahwa dalam regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Diagnosa adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *runs test*. Berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif data penelitian :

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi (model 1)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,13573
Cases < Test Value	69
Cases >= Test Value	70
Total Cases	139
Number of Runs	62
Z	-1,447
Asymp. Sig. (2-tailed)	,148

a. Median

Pada uji autokorelasi diatas nilai *asymsig* sebesar 0,148 > nilai kritis 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data tidak terjadi masalah autokorelasi

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi (model 2)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00622
Cases < Test Value	68
Cases >= Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	50
Z	-3,271
Asymp. Sig. (2-tailed)	,201

a. Median

Pada uji autokorelasi diatas nilai asympsig sebesar 0,201 > nilai kritis 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data tidak terjadi masalah autokorelasi

Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk menganalisis heterokedastisitas dengan grafik plot adalah jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan sumbu Y, indikasinya tidak terjadi heterokedastisitas (Wijaya, 2012:130). Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas , maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas (model 1)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,828	1,833		,998	,320
	pendapatan asli daerah	-,238	,210	-,220	-1,133	,259
	pajak daerah	,245	,164	,277	1,496	,137
	retribusi daerah	-,025	,127	-,026	-,199	,843

a. Dependent Variable: absrtes

Dari tabel diatas dapat dilihat korelasi untuk t statistic dari seluruh tidak ada yang signifikan secara statistic, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas (model 2)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,008	,308		-,027	,978
	pendapatan asli daerah	,047	,071	,333	,666	,507
	pajak daerah	-,163	,123	-1,788	-1,326	,187
	retribusi daerah	,124	,104	1,069	1,190	,236
	mod1	-,010	,011	-3,500	-,974	,332
	mod2	,026	,018	8,266	1,448	,150
	mod3	-,016	,015	-4,921	-1,078	,283

a. Dependent Variable: absres2

Dari tabel diatas dapat dilihat korelasi untuk t statistic dari seluruh tidak ada yang signifikan secara statistic, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi

(Model 1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 ^a	,801	,797	,29995

a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan asli daerah

Table diatas menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,797. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 79,7 %.

Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi

(Model 2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,949 ^a	,901	,897	,11493

a. Predictors: (Constant), mod3, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, mod1, mod2

Table diatas menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,897. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 89,7 %.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh

yang berarti (signifikan) antara variabel independen (Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah) secara parsial terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan SPSS 16.0 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (model 1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,843	,669		8,740	,000
	pendapatan asli daerah	,778	,077	,883	10,135	,000
	pajak daerah	-,143	,060	-,199	-2,396	,018
	retribusi daerah	,184	,046	,232	3,975	,000

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis,2018

Berikut ini adalah hasil uji parsial (Uji t) pada tabel diatas :

H1.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Anggran Belanja Daerah (Y)Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016.

Dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi dan t-hitung masing-masing variabel. PAD memiliki nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dari nilai t-hitung $10,135 >$ dari t-tabel $1,65597$ Maka Ho ditolak dan

H1 diterima yang berarti PAD berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2016.

H2: Pajak Daerah (X2) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (Y) Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016

Pajak Daerah memiliki nilai Sig sebesar $0,018 < 0,05$. Dari nilai t-hitung $2,396 <$ dari t-tabel $1,65597$. Maka H2 ditolak dan Ho diterima yang berarti pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2016.

H3: Retribusi Daerah (X3) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016

Retribusi Daerah memiliki nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dari nilai t-hitung $3,975$ lebih besar dari t-tabel $1,65597$. Maka Ho ditolak dan H3 diterima yang berarti Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2016.

Hasil Analisis Moderating

Setelah dilakukan analisis regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20,0 untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (model 2)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13,375	,506		26,410	,000
	pendapatan asli daerah	,112	,117	,153	,957	,341
	pajak daerah	,833	,203	1,768	4,110	,000
	retribusi daerah	-,611	,171	-1,025	-3,580	,000
	mod1	,036	,017	2,350	2,051	,042
	mod2	,103	,030	6,302	3,461	,001
	mod3	,080	,024	4,804	3,299	,001

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengujian hipotesis 4

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dimoderasi dengan variable Luas Wilayah (Z) memiliki uji t hitung $2,051$ lebih besar dari t tabel sebesar $1,65589$, dan signifikansi untuk koefisien regresi sebesar $0,042$ atau lebih kecil dari alpha 0.05 . Maka luas wilayah mampu bertindak sebagai variabel moderasi.

b. Pengujian hipotesis 5

Variabel Pajak Daerah (X2) dimoderasi dengan variabel luas wilayah (Z) memiliki uji t hitung 3,061 lebih besar dari t tabel sebesar 1,65589 dan signifikansi untuk koefisien regresi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari alpha 0.05 (5%) bertanda positif maka luas wilayah mampu bertindak sebagai variabel moderasi memperkuat pajak daerah dalam uji hipotesis.

c. Pengujian hipotesis 6

Variabel Retribusi Daerah (X3) dimoderasi dengan variabel kondisi keuangan wajib pajak (Z) memiliki uji t hitung 3,299 lebih besar dari t tabel sebesar 1,65589, dan signifikansi untuk koefisien regresi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari alpha 0.05 (5%).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2016.

2. Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2016.
3. Luas wilayah mampu memoderasi pendapatan, pajak dan retribusi daerah terhadap anggaran belanja.

Saran

Saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dan lebih luas agar hasilnya semakin dapat dipertanggung jawabkan agar hasilnya lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau mengganti variabel independen berdasarkan teori-teori yang didapat.
3. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengelola pajak daerah dengan baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4:Jakarta
- DPPD Prov Jateng; *Profil DPPD Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPD Prov Jateng; 2015.
- DPPD Prov Jateng; *Rekapitulasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPD Prov Jateng; 2015.
- DPPD Prov Jateng; *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPD Prov Jateng; 2015.
- DPPD Prov Jateng; *Himpunan Laporan Struktural Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2014*; Semarang ; Kantor Pusat DPPD Prov Jateng; 2015.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Jakarta: MediaKom.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan).Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah
- Saepurrahman, A.S. 2012. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Universitas Siliwangi
- Siahaan, P Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang No. 28. Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan